

SUARA AKADEMIK**Menguji Nyali KPK
Di Batubara****Erwan Efendi**

MENURUT catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut (di Hotel Antares, Medan, Kamis, 30/5/2013) bahwa Kabupaten Batubara menempati rangking pertama korupsi di Sumatera Utara tahun 2013 dengan kerugian negara

mencapai Rp.226 miliar. Kemudian berdasarkan iktisar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2013, FITRA menyebutkan (di kantor DPD Gerindra Sumut, Jalan Kapten Patimura, Kamis, 6/1/2014), Kabupaten Batubara berada pada peringkat ketiga korupsi di Sumatera Utara dengan potensi kerugian negara Rp.73 miliar lebih.

Sungguh sangat fantastis korupsi yang terjadi di Kabupaten Batubara. Pertama, tega-teganya korupsi dilakukan ketika rakyat Batubara hidup dalam kesulitan. Laut sebagai tumpuan mengadu nasib kini tidak lagi dapat diharapkan. Ikan hasil tangkapan terus menurun. Bahkan perairan Batubara tidak lagi aman menjadi lahan mencari nafkah, karena sering menjadi tempat bertempur nelayan. Harga kebutuhan sehari-hari terus melonjak. Kehidupan masyarakat semakin terpuruk, sementara janji-janji untuk perubahan terus mengalir, namun tidak kunjung menjadi kenyataan. Menyedihkan sekali, sesungguhnya rasa prikemanusiaan pelaku sudah hilang. Syahwat syetan lebih menonjol dari pada malaikat, sehingga menghalalkan segala cara untuk dan demi memenuhi kecintaan dunia. Urat malu juga sudah putus, sehingga tidak lagi merasa malu jika berbuat salah bahkan sebaliknya menjadi kebanggaan.

Hal yang paling fantastis lagi bahwa sesungguhnya kerugian negara Rp.299 miliar merupakan terbesar yang pernah terjadi di kabupaten/kota Sumatera Utara. Pantas kalau Batubara meraih juara pertama korupsi se Sumatera Utara. Kalau saja dana Rp.299 miliar itu dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan, sangat banyak masyarakat Batubara yang tertolong. Mereka tidak lagi hidup dalam serba kesulitan, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, Rp.299 miliar itu digunakan untuk kepentingan dan memekaya diri sendiri bahkan mempersiapkan untuk tujuh keturunan. Tidak ada lagi rasa kasihan terhadap nelayan yang sedang bertarung dengan ombak dan badai serta panas di tengah laut. Ibu-ibu nelayan yang sudah tua renta bersama anak-anak mengais pasir di pinggir pantai dengan sengatan mata hari hanya untuk mencari sesuap nasi. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, karena tega-teganya menari dan menyayi di atas penderitaan rakyatnya sendiri

Fantastis yang ketiga adalah, meskipun begitu besar dan terbesar di Sumatera Utara korupsi di Batubara, namun hingga kini belum tersentuh oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). Padahal, daerah lain seperti Kota Medan, Mandailing Natal (Madina), Langkat, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibanding Batubara, KPK berhasil menunjukkan taringnya yang kuat dan tajam, bersikap tanggap dan cepat. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya dan tokoh pemuda sudah lama mendiskusikan sejauh mana kepekaan KPK dalam menanggapi kasus korupsi di Batubara.

Kalangan pejabat di jajaran Pemkab Batubara membantah dan menegaskan bahwa tuduhan korupsi oleh FITRA dan iktisar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan fitnah. Bagi mereka bahwa tindakan korupsi tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi di Pemkab Batubara, karena pengawasan penggunaan anggaran cukup ketat. Sanggahan dan tuduhan fitnah itu merupakan pukulan berat dan akan merusak reputasi FITRA termasuk BPK sebagai institusi negara yang mempunyai hak dan wewenang melakukan pemeriksaan keuangan negara. Dalam hal ini, FITRA dan BPK dituntut untuk bisa membuktikan bahwa sesungguhnya itu bukanlah fitnah tetapi merupakan fakta.

Untuk membuktikan itu, satu-satunya kebijakan yang harus dilakukan dan dengan dukungan berbagai elemen masyarakat Batubara, FITRA harus mampu menghadirkan KPK. FITRA dan masyarakat akan menguji nyali KPK di Batubara, sejauh mana keinginan menangani kasus korupsi di Batubara yang terjadi sudah berbilang tahun itu. Sehingga tidak ada kesan bahwa KPK tebang pilih dalam menangani kasus korupsi kepala daerah. Di samping akan menghilangkan anggapan bahwa pernyataan FITRA itu hanya sebagai alat bargaining dengan kepala daerah.

KPK memang sudah mempunyai reputasi luar biasa dalam menyelamatkan uang negara, namun dalam kasus korupsi di Batubara, menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat mengigit sebegitu besarnya kerugian negara hingga kini belum tersentuh. Sudah lama masyarakat Batubara menunggu kehadiran KPK dan kini saat yang tepat untuk itu. Selamat datang KPK. Semoga.